

## PENGARUH LAHIRNYA ORDE BARU TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG (1965 – 1975)

oleh :

Cahyo Okta Biliantoro, Suharman, Anggar Kaswati

### Abstrak

*Orde Baru muncul sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966. Soekarno sejak itu tidak diijinkan lagi menggunakan gelar sebagai Kepala Negara, Presiden RI, Pimpinan Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan tidak diijinkan menggunakan bendera kepresidenan. Hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dimulai pada bulan April 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama ekonomi Jepang dan Indonesia makin menonjol dan meningkat sejak awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967. Kerjasama ini berupa penanaman modal, bantuan ekonomi dan perdagangan luar negeri antara kedua Negara. Posisi Jepang yang dominan sebagai kreditor, mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Beberapa manfaat dari hubungan Indonesia dengan Jepang selama Orde Baru sangat didominasi oleh sektor ekonomi. Ekonomi dalam bidang pembangunan Indonesia.*

**Kata kunci :** *Orde Baru, Hubungan Diplomatik Jepang dan Indonesia*

### Latar Belakang

Hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Jepang sangatlah unik, khususnya pada masa Orde Baru. Dimana pada awal kedatangan Jepang, mereka bertujuan untuk memperbesar daerah kekuasaan mereka di daerah Asia salah satunya Indonesia. Pada dasarnya Jepang merupakan Negara yang pernah menjajah Bangsa Indonesia, namun kenyataannya mereka secara tidak langsung membantu Bangsa Indonesia untuk mempersiapkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, walaupun hasilnya tidak tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada awal kedatangan Jepang, masyarakat Indonesia tidak menaruh rasa curiga. Mereka merasa Jepang lebih memihak Indonesia dibandingkan pada masa kekuasaan Belanda. Namun lama kelamaan Jepang mulai merampas serta menjadikan rakyat Indonesia menjadi budak mereka untuk melakukan kerja paksa (*Romusha*), dengan kejadian tersebut, pandangan rakyat Indonesia terhadap Jepang mulai berubah, dimana

Jepang dianggap sama seperti Belanda yang telah merampas serta mengeksploitasi Indonesia sebagai tanah jajahan mereka.

Dengan terjadinya penyerbuan Jepang terhadap pasukan sekutu Belanda, memicu adanya perang pasifik di daerah Asia khususnya Indonesia. Berlangsungnya perang tersebut semakin melemahkan pasukan perang Jepang yang mengharuskan mengambil tenaga dari Indonesia sebagai tambahan bagi pasukan Jepang. Tujuan dari melibatkannya tenaga Indonesia untuk menekan kekuasaan Serikat yang semakin besar, Jepang dengan secara tidak langsung merubah sikap terhadap Negara yang didudukinya. Dimana jabatan – jabatan tinggi diberikan kepada orang Indonesia sebagai penasehat pemerintah militer Jepang.

Kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena Jepang terlibat Perang Dunia II. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, dua bom atom dijatuhkan di kedua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki sebagai pembalasan penyerangan Jepang ke Pearl Harbour (markas Angkatan Laut Amerika Se) Amerika Serikat merasa marah atas tindakan Jepang tersebut. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sementara itu tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang akan memberikan kemerdekaan ke tangan Indonesia. Jepang segera membahas tentang kemerdekaan yang telah dijanjikan bagi Indonesia. Golongan muda pada saat itu juga mendesak Ir. Sukarno dan Moh. Hatta agar dilaksanakannya proklamasi segera mungkin. Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Shaleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari mereka menculik Sukarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok. Di sini mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan segera di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro, 1993: 79-80).

Jatuhnya pemerintahan Sukarno sekaligus mengakhiri politik luar negeri yang konfrontatif. Politik yang seperti ini diganti dengan politik bertetangga baik. Sejak saat itu konsentrasi pemimpin Orde Baru (ORBA) difokuskan pada pembangunan kembali ekonomi dalam negeri dan hubungan dengan luar negeri. Langkah utama yang diambil ORBA adalah menjadwalkan kembali kredit – kredit luar negeri Indonesia dan mencari kesempatan yang baik untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan penanaman modal luar

negeri (Bantarto Bandoro, 1994: 1). Dari hasil tersebut, pemerintahan pada masa orde baru melirik kapitalis Barat dan Jepang sebagai negara yang dapat membantu pembangunan Indonesia setelah jatuhnya orde lama. Salah satu tujuan dari politik luar negeri orde baru (ORBA) yakni mencari sumber – sumber peningkatan diri serta dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Latar belakang tersebut peneliti memfokuskan pada Pengaruh lahirnya orde baru terhadap hubungan Indonesia dengan Jepang tahun 1965 – 1975.

### **Lahirnya Orde Baru**

Pemerintahan Orde Lama dimulai sejak kembalinya dasar negara RI kepada UUD 1945 dan setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Soekarno langsung memimpin pemerintahan. Ia membentuk Kabinet Kerja dimana menteri – menterinya tidak terikat kepada partai (G. Moedjanto, 1988: 115). Pelaksanaan demokrasi terpimpin sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pemerintahan khususnya Presiden. Namun dari hasil ini banyak terjadi kejadian dimana bermaksud menguntungkan negara namun sebaliknya. Contoh dari kebijakan pada masa ini adalah Inflasi yang dianggap berdampak pada masyarakat dimana harga – harga menjadi murah, tetapi tidak terbeli oleh rakyat banyak karena tidak memiliki uang. Tetapi jumlah uang bertambah banyak dan harga barang kembali naik (G. Moedjanto, 1988: 116).

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Lama dimana pada awalnya bersifat bebas aktif telah menunjukkan pergeserannya yang condong ke arah kiri. Gerakan 30 September (Gestapu) yang disebut oleh para pelakunya sebagai gerakan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari rencana Kudeta Dewan Jenderal, pada akhirnya menjadi titik awal dari kejatuhan Presiden Soekarno. Setelah kegagalan Gestapu yang didalangi oleh para komunis, arus kuat mengganyang PKI dan menjatuhkn Soekarno tidak dapat dibendung, karena kekuatan anti PKI dan anti Soekarno sudah menunggu – nunggu untuk hal itu (Mahfud MD, 1998: 197).

Surat Perintah 11 Maret 1966 antara lain berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto Men/pangad untuk atas nama Presiden/Pangti ABRI/PBR, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta

keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mengadakan koordinasi bersama angkatan lainnya. Maka dari itu Surat Perintah ini menjadi landasan hukum bagi Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen (G. Moedjanto, 1988: 150).

Jatuhnya pemerintahan Soekarno pertengahan 1960an sekaligus mengakhiri politik luar negeri Indonesia yang bercorak konfrontatif. Politik poros – poros selama demokrasi terpimpin dinyatakan salah oleh MPRS. Indonesia harus kembali ke politik bebas dan aktif, dan tidak memencilkan diri. Politik dengan corak tersebut diganti dengan politik bertetangga baik. Karena itu konfrontasi terhadap Malaysia dihentikan. Hanya dalam hitungan hari, Jepang mendukung pemerintahan nonkomunis Orde Baru dengan menawarkan kredit darurat sebesar US\$ 30 juta. Pada tanggal 29 Mei, Adam Malik bertemu dengan Deputy Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, di Tokyo serta sebagai penanda bahwa konfrontasi telah berakhir (M.C. Ricklefs, 2005: 571).

Upaya pemerintahan Orde Baru untuk memperbaiki hubungan baik dengan pihak Barat ternyata ditanggapi secara positif, yaitu diadakannya Konfrensi Tokyo. Konfrensi ini menyepakati adanya penjadwalan ulang pinjaman Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Disamping itu negara – negara Barat juga menyetujui pembentukan *the Inter Governmental Group for Indonesia* (IGGI) (Ganewati Wuryandari, 2018: 120). Dari hasil pergeseran kekuasaan antara pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru sangat jelas berbeda, dimana pada masa Orde Lama politik luar negeri (Polugri) yang dilakukan saat itu lebih menuju kebijakan yang konfrontatif. Sedangkan pada masa Orde Baru, kebijakan ini segera dihapus karena keadaan Indonesia pada masa itu sangat krisis khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan menghapus kebijakan tersebut, Orde Baru mulai membangun kembali kerjasama dengan negara – negara yang mampu mengembalikan kembali keadaan Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas – aktif dan bertetangga baik.

### **Hubungan Indonesia dan Jepang Pada Masa Orde Baru**

Jepang sendiri menerapkan berbagai sistem mereka dalam pengaruh yang besar di Indonesia. Adapun cara – cara Jepang pada saat itu ialah Mobilisasi Rakyat seperti Pengerahan Pemuda, Organisasi Semimiliter, Organisasi Militer, Pengerahan *Romusha*, serta *Jugun Ianfu*. Tidak hanya itu, Ekonomi Perang, Pendidikan, Komunikasi Sosial serta Budaya juga merupakan salah satu jalan Jepang sebagai Propaganda mereka untuk menguasai Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro, 2010: 75).

Hubungan luar negeri Indonesia – Jepang sebelum tahun 1965 lebih terfokus kepada pelaksanaan perjanjian pampasan perang dan penggunaan dana hasil pampasan perang. Kebijakan yang diterapkan dalam menggunakan dana tersebut ditujukan untuk membangun perekonomian dan sosial secara keseluruhan. Adapun proyek – proyek yang diusulkan seperti proyek Departemen Agama, Pertahanan dan Keamanan, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Perindustrian, Pertambangan, Pertanian, Transmigrasi dan Veteran, Luar Negeri (perluasan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo). Misi pampasan perang sendiri telah berhasil menyelesaikan sekitar 358 kontrak antara Indonesia dengan Jepang (Sartono Kartodirdjo, 1975: 320). Dalam membangun hal tersebut perlu diadakan penyusunan proyek – proyek yang diutamakan.

Pada awal perkembangan Orde Baru khususnya dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan suatu program yang disebut Kabinet Ampera. Program Kabinet Ampera sendiri merupakan suatu usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha dalam memberantas inflansi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008: 565). Dapat dilihat dari segi politik Indonesia, dimana pemerintahan Orde Baru sendiri baru membenahi

sistem politik yang diwariskan oleh Orde Lama. Dimana pandangan – pandangan politik pada saat itu sangat berpengaruh bagi keamanan Indonesia sendiri. Dengan pengembalian status Indonesia sebagai negara hukum serta berpedoman dengan UUD 1945, diharapkan dapat mempengaruhi politik serta keamanan dalam kancah internasional maupun dalam negeri sendiri (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008: 553).

### **Manfaat Hubungan Indonesia dan Jepang Bagi Rakyat Indonesia**

Kerjasama ekonomi Jepang dengan Indonesia makin meningkat pada awal Orde Baru tahun 1967. Hubungan yang paling tampak adalah, hubungan dalam bidang ekonomi, terutama penanaman modal, bantuan ekonomi, serta perdagangan luar negeri antar kedua Negara. Posisi Jepang yang dominan adalah sebagai kreditor, mitra dagang, dan investor bagi Indonesia. Pengaturan pembangunan yang dijalin oleh Indonesia dan Jepang lebih difokuskan terhadap proyek – proyek yang berkaitan dengan infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, telekomunikasi dan jaringan televisi, radio, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, pembangunan pertanian dan desa, peningkatan ekspor yang semuanya memberi sumbangan besar bagi Indonesia (B. Widyahartono, 1996: 1).

Hubungan Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun belakangan ini pada dasarnya baik dan bahkan semakin diperkuat oleh tukar pendapat dalam tingkat pemimpin dan pejabat – pejabat senior. Kunjungan Presiden Soeharto ke Tokyo tahun 1989 dan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kaifu ke Jakarta tahun 1990 serta kunjungan timbal balik antara pejabat – pejabat senior ke Indonesia dan Jepang yang dilakukan kemudian merupakan usaha kedua Negara untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Usaha untuk meningkatkan hubungan antara kedua Negara tentu dilakukan dalam konteks tantangan yang akan dihadapi oleh kedua Negara di masa depan (Bantarto Bandoro,dkk, 1994: 121).

Hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan Jepang telah menimbulkan berbagai macam pandangan di pihak Indonesia mengenai hubungan tersebut. Dimana

rakyat Indonesia sendiri sangat mengawasi langkah – langkah pemerintah dalam hal tersebut. Untuk itu Jepang sendiri harus memiliki pandangan yang luas serta berhati – hati dalam melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia Dalam tingkat regional, Indonesia dan Jepang perlu mempertahankan komitmen mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka guna stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara besar yang penagruh dan peran ekonominya sangat penting di Asia Tenggara. Namun kebijakan ekonomi di daerah Jepang sendiri sering tidak pasti dan selalu berubah, tentunya perubahan – perubahan ini sesuai dengan yang terjadi di kawasan Indonesia. Perubahan yang terjadi di kawasan Indonesia baik faktor intern maupun faktor ekstern akan membawa dampak tertentu pada stabilitas negara atau kawasan secara keseluruhan dan terutama pada hubungan bilateral yang sudah terjalin. Dengan demikian, Indonesia dan Jepang membuat sebuah forum politik untuk membahas masalah – masalah yang terjadi di kedua negara.

### **Simpulan**

Dengan keadaan yang ditinggalkan oleh sisa – sisa pemerintahan pada masa Orde Lama. Orde Baru sendiri mulai membangun Indonesia kembali dengan langkah membuka kembali politik luar negeri yang bebas aktif dari sebelumnya yang bersifat konfrontasi. Hal ini bertujuan membuka minat negara lain untuk membantu Indonesia dalam segi ekonomi, politik, maupun dalam bidang keamanan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahan Orde Baru memerlukan bantuan dari negara – negara lain seperti Jepang dan negara lainnya.

Dari hubungan yang dijalin dengan Jepang, hubungan dalam segi politik ataupun keamanan di Indonesia juga sangat berpengaruh. Pada masa Orde Baru sendiri sedang dalam tahap pembenahan sistem politik serta keamanan yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Dalam hal ini melihat dari segi letak geografis Indonesia yang setrategis di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara merupakan langkah baik bagi Indonesia. Jepang melihat peranan penting Indonesia di Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan ini juga sangat membantu Jepang dalam bidang pengamanan jalur dagang laut Jepang di Asia Tenggara karena Indonesia sendiri memiliki peranan yang besar bagi Asia Tenggara.

Dari hubungan antara Indonesia dan Jepang, dapat dilihat keuntungan Indonesia dalam bidang investasi serta pembangunan dalam negeri. Namun secara garis besar dari hubungan ini lebih memberi manfaat lebih bagi Jepang. Manfaat yang diperoleh adalah menjaga kestabilan jalur dagang Jepang di kawasan Indonesia (Selat Malaka), keuntungan dari pengembalian bunga kredit, serta Indonesia sebagai daerah pemasaran produk – produk Jepang yang laris terutama barang – barang elektronik dan otomotif (motor dan mobil).



**Daftar Pustaka**

- Bantarto Bandoro, J. Wanandi, R. Dewanto, W., A.R. Sutopo, A. Usman, Y. Ariessusanto, 1994, *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Bob Widyahartono, 1996, *Refleksi Hubungan Jepang-Indonesia (1): Dari Pampasan Perang, Malari Sampai Mobnas*, Jawa Pos 10 Oktober 1996, Terdapat di <http://www.jawapos.co.id/indonesia/jawapos/news/today/analysis/a1101096.html/> (Diakses tanggal 10 Agustus 2019).
- Ganewati Wuryandari, 2018, *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud. MD, 1988, *Pemerintahan Yang Bersih: Prespektif Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto. G, 1988, *Indonesia Abad Ke 20 Jilid 2*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ricklef. M.C, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sartono Kartodirdjo, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.